

KECAMATAN – STANDAR PELAYANAN – ADMINISTRASI

2013

PERBUP PEMALANG NO. 33, BD. 2013/NO. 33, 21 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK: - Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan kepada masyarakat di bidang perizinan, diperlukan adanya standar pelayanan yang jelas dan trasparan. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan menyebutkan bahwa Standar Pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 69 Tahun 2005; Permendagri No. 19 Tahun 2008; Permendagri no. 4 Tahun 2010; Permenpan RB No. 36 Tahun 2012; Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/07/2003; Perda No. 1 Tahun 2008; Perda No. 14 Tahun 2008; Perbup No. 49 Tahun 2012; Perbup No. 16 Tahun 2013.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud dan Tujuan. Jenis Pelayanan. Standar Pelayanan. Maklumat Pelayanan. Penandatanganan Perizinan.

CATATAN: - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.